

Judul : KPK Bekukan Rekening Setya Dan Keluarga
Tanggal : Selasa, 28 November 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

KPK BEKUKAN REKENING SETYA DAN KELUARGA

Setya bisa dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi membekukan rekening Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto beserta keluarganya. Penghentian sementara aktivitas rekening itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP yang membelit Setya. "Sudah diblokir," kata kuasa hukum Setya, Friedrich Yunadi, di gedung KPK, kemarin. Ia tidak bersedia merinci jumlah rekening kliennya yang dibekukan KPK. Friedrich justru meminta KPK menjelaskan alasan pemblokiran tersebut.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak membantah adanya pembekuan rekening tersebut. "Itu kewenangan penyidik, sebagai bagian dari bagian penyidikan yang sudah berlangsung," ujarnya, kemarin.

Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, mendukung pembekuan rekening Setya sekeluarga. Menurut dia, pembekuan rekening itu penting untuk mengamankan alat bukti. Selain itu, ia melihat adanya potensi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Setya dalam kasus e-KTP.

Ihwal kemungkinan KPK

menjerat Setya dengan Undang-Undang Pencucian uang. Saut Situmorang belum bersedia berkomentar. "Tentang ujung dari tindak ini, penyidik yang lebih tahu ke arah mana." Sementara Friedrich tidak bersedia berkomentar.

Keluarga Setya memang disebut terlibat dalam kasus e-KTP. Dalam sidang e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong pada awal November lalu, jaksa menyatakan keluarga Setya menguasai 42 persen saham PT Murakabi Sejahtera—perusahaan yang terlibat dalam proyek e-KTP—melalui PT Mondialindo Graha Perdana. Sebanyak 50 persen saham Mondialindo dimiliki Deisti Astriani Tagor, istri Setya; dan 30 persen dikuasai anak Setya, Reza Herwindo. Sedangkan putri Setya, Dwina Michaela, tercatat menjabat komisaris Murakabi pada 2011.

Deisti kini juga telah dicegah ke luar negeri. Setya membantah terlibat dan menyatakan tidak mengetahui ihwal penguasaan Murakabi oleh keluarganya. "Tidak pernah disampaikan," katanya. Setya saat ini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP untuk kedua kalinya. Status tersangka sebelumnya dibatalkan oleh hakim tung-



gal sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, pada 28 September lalu.

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, juga mendorong KPK menjerat Setya dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara sekaligus menjerat semua pihak yang terlibat. "Bisa terlihat siapa saja yang bertindak sebagai penjala, penampung uang hasil korupsi," katanya.

● HUSSEN ABRI
DOKORAH | MIRA
PG / KOMPAS

Setya Diduga
Mengulur Waktu
Pemeriksaan
Halaman 4

Melonjak Puluhan Miliar

	2009	2015
Kekayaan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, terus bertambah. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada 2009, harta yang dimiliki Setya sekitar Rp 73,78 miliar. Enam tahun kemudian, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu kembali melaporkan kekayaan, kali ini dengan nilai Rp 114,769 miliar. Berikut ini aset-aset yang dimiliki Setya:		
Harta tidak bergerak	Rp 49 miliar	Rp 81,7 miliar
Harta bergerak	Rp 3 miliar (kendaraan 11 unit)	Rp 2,3 miliar (kendaraan 6 unit)
Harta bergerak lain	Rp 1,3 miliar	Rp 932 juta
Surat berharga	Rp 6,5 miliar (8 item)	Rp 9,4 miliar (6 item)
Giro dan setara kas	Rp 13,8 miliar dan US\$ 17.781	Rp 21,2 miliar dan US\$ 49.150

● HUSSEN ABRI DOKORAH | LIPUTAN KPK | ILLUSTRASI: TEMPO/REDAKSI PRAMITA